

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Luthfi Chalis Shiraath¹, Ali Anis²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: luthfichaliss7@gmail.com, alianis2911@yahoo.com

Info Artikel

Diterima:

31 Oktober 2023

Disetujui:

06 November 2023

Terbit daring:

01 Desember 2023

DOI: -

Sitasi:

Shiraath, L.C., & Anis, A (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Investasi Swasta Terhadap Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Abstract:

This study is aimed to determine the influence of fiscal decentralization, public investment, and private investment on the effectiveness of the implementation of regional autonomy of regencies or cities in West Sumatra province. The types of this research are descriptive and inductive. This study used secondary panel data sources from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance with cross-sections of 19 regencies and cities in West Sumatra and a time series from 2013 to 2021. The analysis in this study is a panel data regression analysis. The results of this study found that: (1) fiscal decentralization has a positive and significant effect on the effectiveness of regional autonomy implementation; (2) public investment has a positive and insignificant effect on the effectiveness of regional autonomy implementation; and lastly, (3) private investment has a positive and significant effect on the effectiveness of regional autonomy implementation.

Keywords: Fiscal Decentralization, public investment, private investment, regional autonomy.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik, dan investasi swasta terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan induktif. Penelitian ini menggunakan data panel sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan cross section 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan time series 2013 sampai 2021. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah, (2) investasi publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah, dan (3) investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Investasi Swasta, Otonomi Daerah.

Kode Klasifikasi JEL : P33, H54, R42

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia ditandai dengan dimulainya periode Reformasi pada tahun 2001. Esensi kekuasaan yang semula adalah sentralisasi berubah menjadi daerah berdaya tersendiri atau biasa disebut dengan daerah otonom. Perubahan ini akan membuat daerah lebih mandiri dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Pemerintah daerah yang mengatur daerahnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah UU Daerah Otonom disahkan, Daerah Otonom akan memiliki kekuasaan tertinggi atas

wilayahnya yang terlepas dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah otonom lebih aktif dalam pembangunan daerah. Dengan bantuan sistem ini, pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan lebih memahami kebutuhan daerah, sehingga pembangunan lebih terarah.

Namun pada kenyataannya, setelah 20 tahun otonomi daerah dari Indonesia, banyak daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sekarang, pertanyaan utamanya bukan lagi bagaimana membuat sistem transfer agar sumber keuangan daerah (terutama daerah miskin) relatif memadai dan tidak terlalu timpang antar daerah. Saat ini, pertanyaan utamanya adalah bagaimana membimbing daerah, terutama yang tidak memiliki kendaraan, agar dapat menggunakan APBD dengan bijak dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hirawan, 2007).

Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah sendiri diartikan sebagai hak, kekuasaan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan sentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah akan berdampak positif bagi perekonomian daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa tujuan daerah yang berpemerintahan sendiri adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang seluas-luasnya, kecuali dalam hal-hal praktis bersifat umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pelayanan publik, dan daya saing antar daerah.

Menurut Bastian (2006), Ada beberapa indikator yang mengukur keberhasilan suatu daerah dalam otonomi daerah, antara lain yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil cenderung meningkat yang akan mengakibatkan pendapatan per kapita juga akan meningkat. 2) Investasi cenderung meningkat, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. 3) Daerah cenderung mengembangkan prospek bisnis/usaha di daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal adalah proses pengalokasian anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah atas dasar berbagai fungsi pemerintahan untuk mendukung fungsi, misi, dan layanan pemerintah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi disparitas fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarsektor lainnya, serta meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi sumber daya, untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal adalah desentralisasi kekuasaan untuk mengelola potensi ekonomi dan sumber daya daerah lainnya, tetapi selalu melibatkan transfer dari pemerintah pusat.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri daerah otonom adalah kemandirian keuangan, yang meliputi penggunaan sumber daya keuangan secara rasional dan penggunaan sumber daya keuangan secara bijaksana, adil dan benar. Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan otonominya.

(Musgrave, 1959) Fungsi ekonomi pemerintah menurut teori ekonomi publik meliputi 3 fungsi, antara lain: Efisiensi Sumber Daya, Retribusi Pendapatan dan Stabilitas Makroekonomi

Investasi publik juga dikenal sebagai investasi pemerintah ketika pemerintah berinvestasi dalam mengembangkan atau mendukung komunitas atau program tertentu untuk memulihkan atau meningkatkan situasi ekonomi suatu negara atau untuk mensejahterakan penduduk.

Investasi publik umumnya dilakukan oleh pemerintah. Investasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Investasi ini erat kaitannya dengan perencanaan modal proyek yang sedang dikerjakan.

Menurut Solow (Mankiw, 2007, p. 85) pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh investasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap investasi melalui kebijakannya agar terciptanya daya saing antar daerah di era otonomi daerah.

Investasi swasta adalah penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Investasi swasta lebih menguntungkan daripada investasi publik dan memiliki dampak yang lebih besar pada pertumbuhan. Alasannya, investasi swasta lebih efisien dan transparan daripada sektor publik. Investasi swasta berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi (Beddies, 1999).

Menurut Kholis, (2012) cara untuk mendapatkan modal adalah dengan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ketika persediaan tabungan domestik tidak mencukupi. Dengan demikian, investasi memegang peranan penting dalam dinamika kehidupan perekonomian suatu negara. Karena pembentukan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi, kemudian meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan banyak lapangan kerja baru, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif dan penelitian induktif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang diteliti. Penelitian induktif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan data *time series* dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Dalam penelitian ini, panel regresi data menggunakan metode *Random Effects Model* (REM) digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan Eviews9. Berikut adalah persamaan model regresi antara lain:

$$EIOD = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 IP_{it} + \beta_3 IS_{it} + u_{it} \quad (1)$$

Dimana, EIOD adalah Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah, DF adalah Desentralisasi Fiskal, IP adalah Investasi Publik, IS adalah Investasi Swasta, u adalah Error Term, i adalah wilayah dan t adalah tahun

Definisi Operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut; Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah adalah tingkat ketercapaian tujuan otonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan data PDRB Perkapita Atas Harga Belaku kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dengan satuan Rupiah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan dalam bidang keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat dan diukur dengan formula perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah dengan satuan persen.

Investasi publik adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan diukur dengan data belanja modal dengan satuan Rupiah. Investasi swasta merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pihak swasta di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat untuk pembelian barang modal baik oleh swasta domestik maupun asing dan diukur dengan penjumlahan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) satuan Rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi swasta yang dihitung berdasarkan penjumlahan penanaman modal asing dan penjumlahan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal, investasi publik dan investasi swasta secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik dan investasi swasta sebagai variabel bebas terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah sebagai variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi panel dengan menggunakan metode *Random Effects Model* (REM), maka hasil estimasi akhir yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$IOD = 9.879255 + 0.040164DF_{it} + 0.007351LOGIP_{it} + 0.010013LOGIS_{it} \quad (2)$$

Tabel 1 Hasil Uji Random Effect Model

Variable	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	9.879255	10.84181	0.0000
X1	0.040164	7.717908	0.0000
X2	0.007351	0.206240	0.8369
X3	0.010013	2.527563	0.0124
Weighted Statistics			
R-Squared		0.321735	
Prob(F-Statistic)		0.000000	

Sumber : Hasil Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan Nilai R-Squared sebesar 0,321735. Artinya, sebesar 32% efektivitas implementasi otonomi daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu desentralisasi fiskal, investasi publik, dan investasi swasta. Sedangkan sisanya sebesar 68% dijelaskan oleh variabel selain model atau yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar 0.040 . Artinya peningkatan desentralisasi fiskal sebesar satu satuan diukuti oleh peningkatan

efektivitas implementasi otonomi daerah. Demikian sebaliknya, penurunan desentralisasi fiskal juga diikuti oleh penurunan efektivitas implementasi otonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil temuan dalam penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Christia & Ispriyarso (2019) yang menemukan bahwa, Desentralisasi fiskal memegang peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, karena desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara dimana pemerintah daerah secara mandiri mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi di daerahnya.

Investasi publik berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar 0.007. Artinya peningkatan investasi publik sebesar satu satuan diikuti oleh penurunan efektivitas implementasi otonomi daerah. Demikian sebaliknya, penurunan investasi publik akan meningkatkan efektivitas implementasi otonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil temuan dalam penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Aulia Siregar (2017) yang menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita masyarakat kabupaten/kota yang terdapat di Sumatera Utara.

Investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar 0.010. hal ini bermakna terjadinya peningkatan investasi swasta sebesar satu satuan diikuti oleh peningkatan efektivitas implementasi otonomi daerah. Demikian sebaliknya, penurunan investasi swasta juga diikuti oleh penurunan efektivitas implementasi otonomi daerah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil temuan dalam penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Nurjalal (2019) yang menemukan bahwa interaksi antara investasi dan otonomi daerah sangat kuat. Artinya semakin siap suatu daerah dalam memberikan peluang investasi maka secara tidak langsung keuangan daerah tersebut semakin meningkat dan sebaliknya. Keinginan ini ditentukan pula oleh keuangan wilayah itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan memakai *Random Effect Model* serta deskripsi terhadap hasil penelitian antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut; Desentralisasi fiskal yang diukur dengan kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Investasi publik yang diukur dengan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Investasi swasta yang dihitung berdasarkan penjumlahan penanaman modal asing dan penjumlahan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap

terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal, investasi publik dan investasi swasta secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik dan investasi swasta terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu; Kemandirian fiskal daerah di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata masih dibawah 50% yaitu sebesar 8,78%. Artinya pengaruh Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah dan daerah-daerah tersebut masih bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pada investasi publik yang diukur menggunakan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur berdasarkan PDRB Perkapita. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membuat perencanaan alokasi belanja modal yang diawali dengan anggaran belanja modal dengan nilai yang relatif lebih besar. Investasi swasta yang dilakukan oleh pihak swasta masih belum merata di wilayah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Sebaiknya, pemerintah juga harus membuat kebijakan agar mendorong para investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penulis mengharapkan kepada penelitian mendatang dapat melakukan pengembangan lebih lanjut atas pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik dan investasi swasta terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adi, Priyo Hari, and David Harianto. 2015. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Perkapita." (July 2007):1–27.
- Afrizal, Fitrah. 2013. "Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011." Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- B.S, Hirawan. 2007. "Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) Di Indonesia." *Universitas Indonesia* (Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
- Bahl, Roy W. 2000. "China : Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform Dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries." *Cambridge University Press*.
- baihaqi. 2011. "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu." *Jurnal Akuntansi*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Beddies, Christian H. 1999. *Investment, Capital Accumulation, and Growth : Some Evidence from The Gambia*.

- Dampak, Analisis, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, and Terhadap Kesenjangan. 2004. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. (33):1–21.
- Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana sari, and Diota Prameswari Vijaya. 2018. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Ebel, Robert D., and Serdar Yilmaz. 2002. “Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview.” *World Bank Institute* 1–64.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, Bambang Supomo, and Muhammad Syam Kusufi. 2012. “Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan.” 60–61.
- Indraningrum, Tri. 2011. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.” *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*.
- Jhingan, M. .. 2004. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Joseph Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Grafindo.
- Lukman, Muhammad. 2015. “ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN FLYPAPER EFFECT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Jepara Tahun 2001 – 2013).” Universitas Diponegoro Semarang.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Kebijakan Destralisasi Fiskal Di Era Reformasi: 2005-2008. Dalam: Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep Dan Implementasi)*. Jakarta: Gramedia-Kompas.
- Musgrave, Richard A. 1959. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw Hill.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Programme, United Nation Development. 1990. *Human Development Report*. New York: UNDP.
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, and Imam Mukhlis. 2016. “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia.” *Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang* 9.
- Rondinelli, D. A., J. R. Nellis & G. S. Cheema. 1983. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. washington: The world Bank.
- Sakarya, T. H. E., and Journal Of. 2018. “EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.” 7(2):44–68.
- Sukirno, Sadono. 2002. “Pengantar Teori Makroekonomi.” Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika Dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.

Todaro. 2006. "Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga." Jakarta: Erlangga.

Wallace Oates. 1993. "Fiscal Decentralization and Economic Development." *National Tax Journal* 46(2):237-43. doi: 10.1086/NTJ41789013.

Zaris, Roeslan. 1987. "Prespektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional." Jakarta: LPFE UI.